

Dukungan Forest Programme IV, BBKSDA Sulsel Laksanakan Ekspose dan Workshop AWP

Subhan Riyadi - SULSEL.JURNALIS.ID

Mar 18, 2023 - 14:47



MAKASSAR - Pelaksanaan Forest Programme IV pada tahun 2023 telah memasuki tahun ke-4. Sebagai kegiatan pertama dalam Annual Work Plan 2023, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan selaku Project Implementing Unit (PIU) melaksanakan Ekspose Kegiatan Tahun 2022 serta Workshop AWP 2023 bertempat di Hotel Harper Perintis Makassar selama 2 (dua) hari, mulai Selasa s/d Rabu, 7-8 Maret 2023.

Sebagai Taman Nasional ke-53 yang belum mempunyai organisasi pengelola, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor: SK.29/KSDAE/SET.3/OTL.0/2/2023 telah ditetapkan Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan sebagai unit pelaksana dan unit pembina teknis organisasi pengelolaan TNGD. Forest Programme IV telah mendukung pengembangan dan pengelolaan

TNGD melalui beberapa kegiatan utama yang dituangkan dalam Annual Work Plan (AWP), diantaranya, pembangunan fasilitas dan infrastruktur pengelolaan, penataan dan perencanaan kawasan, penguatan kelembagaan dan SDM, penandaan batas kawasan, patroli dan monitoring hutan serta pemulihan ekosistem.

Melalui kegiatan ekspose dan workshop ini diharapkan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Forest Programme IV dapat terdiseminasikan, peran serta dan komitmen para pihak dapat ditingkatkan serta diperoleh masukan untuk pemantapan rencana kerja tahun 2023.

Sebagaimana disampaikan Jusman, Kepala Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan bahwa tujuan kegiatan ekspose ini untuk mengkomunikasikan apa yang telah dilaksanakan dan apa yang akan dilaksanakan ke depan.

Hadir membuka ekspose, Andi Aco Takdir, selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat.

Andi Aco Takdir dalam arahannya menyampaikan arti penting keberadaan TNGD dalam menjaga kelestarian sumber daya alam dan potensi wisata alam di Sulawesi Barat.

"Selain itu, pengembangan dan pengelolaan TNGD merupakan perjuangan yang panjang dan memerlukan kolaborasi para pihak," tambahnya.

Direktur Pengelolaan Kawasan Konservasi Ditjen KSDAE, Jefry Susyafrianto, memaparkan terkait kebijakan pengelolaan Taman Nasional sebagaimana diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2011 jo PP Nomor 108 Tahun 2015 yang meliputi aspek perencanaan kawasan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan secara lestari, evaluasi kesesuaian fungsi, kerjasama pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat.

Jefry menyampaikan bahwa masyarakat bukanlah obyek pengelolaan Taman Nasional, namun sebagai subyek.

Fardi Ali Syahdar dari Project Manager Fauna Flora International Sulawesi Office dan Abdul Syukur, Sulawesi Community Foundation bertindak sebagai moderator yang memandu jalannya penyampaian materi dan diskusi.

Kegiatan dilaksanakan secara faktual dan virtual ini diikuti 33 peserta dari unsur Organisasi Perangkat Daerah, perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat (Lambanan, Rambu Saratu, Tondok Bakar, Taupe, Mambuliling, Bubun Batu dan Osango), AMAN Mamasa, tokoh perempuan, media lokal, UPT Kementerian LHK, konsultan dan NPMU Forest Programme IV.

Beberapa isu yang mengemuka selama pelaksanaan diskusi antara lain, mendorong skema pembayaran atas jasa lingkungan (payment environmental services), peningkatan peran serta lembaga adat, OPD dan media lokal serta peningkatan pemberdayaan masyarakat dan konservasi jenis asli setempat.

Rumusan hasil kegiatan ekspose disusun pada akhir acara sebagai bahan

rencana tindak lanjut di tahun 2023, dalam rangka mengidentifikasi permasalahan dan tantangan serta memperkuat sinergi kolaborasi dalam pengelolaan TNGD.

Acara ditutup dengan closing statement Direktur Pengelolaan Kawasan Konservasi yang menekankan bahwa kolaborasi dengan pemerintah daerah penting sekali dijalin serta perlunya mengawal dan menindaklanjuti hasil ekspose.